

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal

Ahmad Khafif¹, Romandhon^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia

romandhon@unsiq.ac.id*

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran, dan rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2016 sampai 2019.

Metode – Sampel penelitian ini adalah 36 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2016 sampai 2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dianalisis menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil - Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, serta rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Implikasi - Penelitian ini dapat menjadi pedoman pengambil kebijakan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kata kunci : rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangandaerah, rasio tingkat pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran, rasio kemandirian, alokasi belanja modal.

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian mengalami perubahan kembali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola pemerintahannya. Pengelolaan yang dimaksud yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi. Keberadaan dari otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan serta memperbaiki perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan barang dan pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditandai dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita daerah, karena dari peningkatan tersebut dapat dilihat adanya tambahan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arsyad, 2015). Agar hal tersebut dapat terwujud, tentunya pemerintah daerah perlu memberikan fasilitas investasi melalui alokasi belanja modal yang lebih besar. Hidayat (2013) mengatakan dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan penerimaan yang diterimanya untuk belanja daerah terutama untuk

pengalokasian belanja modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, yang mengatakan jika besarnya alokasi anggaran untuk belanja modal sekurang-kurangnya atau lebih dari 30% sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Rata-rata tiap jenis belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Belanja pegawai (langsung dan tidak langsung) masih mendominasi belanja daerah di setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Bali. Berbeda dengan belanja pegawai, walaupun belanja barang dan jasa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tidak mendominasi seperti belanja pegawai namun rata-rata proporsi belanja barang dan jasa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang cukup tinggi. Belanja daerah yang ditunjukkan untuk belanja modal juga menunjukkan rata-rata yang berbeda di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, pada tahun 2016 sampai 2019 belanja modal pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali belum mencapai target yang sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) No 5 Tahun 2010 yaitu masih dibawah 30%.

Kajian Pustaka

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambahbelanja bersifat rutin. Dalam PP No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.

Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Alokasi Belanja Modal

Mahmudi (2010: 26) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menjelaskan tentang ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio kemandirian yang tinggi keuangan daerah maka, semakin rendah ketergantungan daerah pada bantuan pihak luar. Rasio kemandirian keuangan daerah juga, menggambarkan tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD (Halim, 2008: 233). Saruc and Sagbas (2008) berpendapat bahwa efek transfer terhadap upaya pajak pemerintah daerah dapat diamati melalui tingkat pengeluaran pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam membayar pajak dan retribusi seharusnya diimbangi penyediaan infrastruktur atau aset tetap oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diwujudkan dengan pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu Purnamawati (2016) membuktikan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi derajat desentralisasi maka akan mengakibatkan pula pada peningkatan alokasi belanja modal. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasibelanja modal

Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Saruc dan Sagbas dalam Ni Made Deni dan Henny (2018), berpendapat bahwa efek transfer terhadap upaya pajak pemerintah daerah dapat diamati melalui tingkat pengeluaran pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahrul Huda, Rr Titiek Herwanti, dan Rr Sri Pancawati (2015) membuktikan bahwa, rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Lilis Marlina, Mirna Indriani, dan Heru Fahlevi (2017) dan penelitian Hady Sutjipto, Stania Cahaya Suci, dan Yogi Sabarudin Umbara (2019) yang membuktikan bahwa, ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dalam hal ini berarti penerimaan yang bersumber dari PAD belum mampu untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, ketika ketergantungan keuangan suatu daerah tinggi maka daerah tersebut terlalu banyak bergantung terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi untuk menambah alokasi belanja modal. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Pengaruh Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diindikasikan menjadi salah satu sumber pendanaan belanja modal untuk pelayanan publik. SiLPA tahun lalu yang besar pada struktur penerimaan pendapatan menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal. Hal tersebut berarti kenaikan tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu maka, alokasi belanja modal tahun berikutnya juga meningkat. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Made Deni Indiyanti dan Henny Rahyuda (2018) membuktikan bahwa tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Semakin tinggi rasio tingkat pembiayaan SiLPA akan berdampak pada naiknya pendapatan daerah. Ketika tingkat pembiayaan SiLPA tinggi menunjukkan kemampuan keuangan daerah lebih tinggi sehingga memungkinkan pengalokasian lebih besar terhadap belanja modal. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3 : Tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

Pengaruh Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal

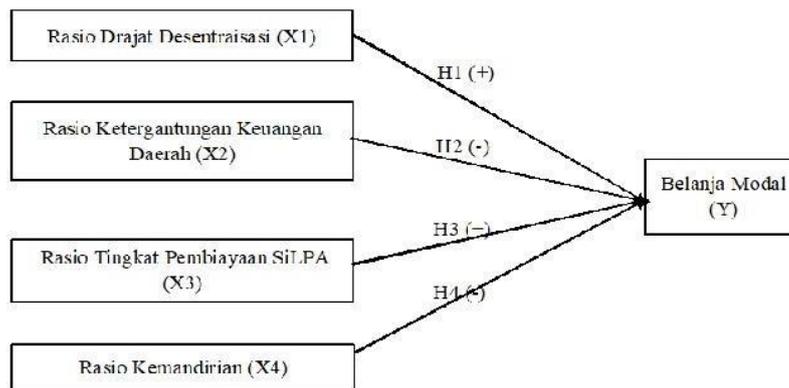
Saat ini, tingkat kemandirian daerah belum dapat menunjukkan kemajuan yang berarti bahkan bila melihat kondisi pemerintahan saat ini kemandirian daerah cenderung menurun. Adi (2007) dalam Utomo (2012), mengindikasikan kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis, upaya ini lebih dipilih daripada meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga sebagai konsekuensinya PAD yang diterima menjadi lebih kecil. Kondisi ini membuat kemandirian daerah semakin rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Purnamawati (2016) membuktikan bahwa, rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana

dari luar. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi rasio kemandirian, dimana tersedia dana yang cukup bagi alokasi belanja modal. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H4: Rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap belanja modal

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dibuat model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Model Penelitian



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Metodologi

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD diseluruh pemerintahan Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Bali. Sampel dilakukan dengan teknik total sampling yaitu dengan teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang berjumlah 9. Dan juga menggunakan time series sebanyak empat tahun dari 2016 sampai 2019. Sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel bebas (independen), satu variabel terikat (dependen). Variabel independent (X) dalam penelitian ini yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA, dan rasio kemandirian keuangan dan Variabel dependent (Y) adalah belanja modal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberi gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu alokasi belanja modal, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran dan rasio tingkat kemandirian. Berdasarkan output analisis deskriptif dengan hasil statistik deskriptif dari data penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	36	.09809	.72326	.5120093	.17641030
X2	36	.09809	.72326	.5241396	.16783873
X3	36	.00919	.21957	.0897960	.05832499
X4	36	.00864	.04204	.0168977	.00809109
Y	36	129434103	1241111665	325983704.83	271678110.102
Valid N (listwise)	36				

Sumber : data sekunder diolah, 2021

Tabel 1 diatas menggambarkan deskripsi variabel-variabel secara statistik dalam penelitian ini. *Minimum* adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, *maximum* adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, *mean* (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data menunjukkan deskriptif variabel penelitian jumlah data setiap variabel sebanyak 36

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, adapun hasil pengolahan datanya sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1061536742.659	82463970.177		12.873	.000
X1	14930191.893	257261344.070	.010	.058	.954
X2	-1317919911.168	272929726.863	-.814	-4.829	.000
X3	1629210235.674	391284201.371	.350	4.164	.000
X4	-11760166758.591	2717646908.756	-.350	-4.327	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2. diperoleh persamaan linier bergandasebagai berikut:

$$Y = 1.061.536.742,659 + 1230.191,893 (X1) - 1.317.919.911,168 (X2) + 1.629.210.235,674 (X3) - 11.760.166.758,591 (X4) + 109.978.738,927$$

Mengacu pada tabel 2, maka persamaan regresi tersebut dapatdijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 1.061.536.742,659 (bernilai positif) menunjukkan bahwa ketika variabel independen (rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA dan rasio kemandirian) bernilai konstan, makakabupaten/kota di Provinsi Bali yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan alokasi belanja modalnya cenderung naik selamaperiode amatan.
2. Tabel 2. menunjukkan bahwa variabel rasio derajat desentralisasi memiliki nilai koefisien regresi yaitu sebesar 1230.191,893 dengan nilai signifikan sebesar 0,954.

Nilai ini lebih besar dari nilai 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal ditolak. Artinya, bila sumber pendapatan yang diterima daerah dari PAD jumlahnya kecil, sehingga penggunaannya lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dan belanja rutin serta PAD tidakterlalu menunjang untuk belanja modal serta didukung dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2017) yang menemukan bahwa rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh secara empiris terhadap alokasi belanja modal.

3. Tabel 2. menunjukkan bahwa variabel rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki nilai koefisien regresi yaitu sebesar - 1.317.919.911,168 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesiskedua yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal diterima. Artinya, semakin rendah tingkat ketergantungan, maka daerah tersebut dikatakan semakin mandiri sehingga dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar.
4. Tabel 2. menunjukkan bahwa variabel rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki nilai koefisien regresi yaitu sebesar 1.629.210.235,674 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal diterima. Artinya, semakin besar sisa lebih pembiayaan anggaran maka dapat mengakibatkan alokasi belanja modal yang lebih besar. Dengan asumsi variabel-variabel dianggap konstan.
5. Tabel 2. menunjukkan bahwa variabel rasio kemandirian memiliki nilai koefisien regresi yaitu -11.760.166.758,591 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal diterima. Artinya, Semakin rendah rasio kemandirian mengantung arti dimana tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, provinsi ataupun asing semakin tinggi. Rasio ini juga menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dimana semakin rendah tingkat kemandiriannya semakin rendah pula patisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerahnya

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS V25 seperti terlihat pada Tabel 2. di atas, variabel rasioderajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal”, ditolak. Hal ini didukung dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2017) serta Yulistiani Marlianita dan Suji Abdullah Saleh (2020) yang menemukan bahwa rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh secara empiris terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian yang telah dilakukan padatabel 2 untuk rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal sehingga hipotesis pertama (H2) diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitiansebelumnya yang dilakukan oleh Yulistiani Marlianita dan Suji Abdullah Saleh (2020), dan Novita (2020) yang menyatakan rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini membuktikan besaran pendapatan dana perimbangan yang berasal dari DAU memberikan kontribusi

yaitu hampir sebesar 79% yang penggunaannya lebih banyak digunakan untuk menutup kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional. Sementara, besaran dari DAK fisik yang digunakan untuk penguatan fisik seperti infrastruktur yang sekaligus menjadi sumber pembiayaan untuk menutup alokasi belanja modal sebesar 21% nilainya kecil, sehingga hal ini tidak terlalu berpengaruh pada alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada table 2 variabel sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal sehingga hipotesis keempat (H3) diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulistiani Marlianita dan Suji Abdullah Saleh (2020), Indiyanti (2018) dan Novita (2020) yang membuktikan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan SILPA memiliki kontribusi dalam peningkatan pengalokasian belanja modal daerah. Semakin bertambah SILPA suatu daerah maka semakin meningkat pula alokasi belanja modal suatu daerah. SILPA yang merupakan sisa lebih realisasi pendapatan dengan belanja serta penerimaan dan pembiayaan dapat dijadikan sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan dan belanja di tahun selanjutnya, termasuk pengalokasian untuk belanja modal.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS V25 seperti terlihat pada Tabel 2 di atas, variabel rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal", diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bali tergolong sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah di Provinsi Bali tahun 2016-2019 yaitu sebesar 11%. Hal ini berimplikasi bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan dari pihak eksteren (terutama bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi) masih sangat tinggi. Nilai rasio kemandirian terendah terjadi pada tahun 2019 dimana nilainya sebesar 7% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 29%.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan pengujian yang telah dilakukan pada study empiris kabupaten/kota di Provinsi Bali diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu: rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut dikarenakan rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi atau besaran kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali berada pada katagori yang masih rendah, sehingga penggunaan PAD hanya dapat digunakan untuk menutupi belanja yang bersifat rutin meskipun nilai dari PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan. rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio ketergantungan, maka alokasi belanja modal yang dilakukan akan rendah karena dana yang akan digunakan untuk memenuhi belanja pegawai dan belanja oprasional. Kinerja keuangan berupa rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan

besarnya SiLPA tahun lalu yang terbentuk karena tidak terealisasinya belanja akan digunakan kembali untuk merealisasikan belanja yang salah satunya yaitu untuk belanja modal guna menunjang program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di tahun selanjutnya. Rasio kemandirian memiliki tingkat pengaruh negatif terhadap alokasi belanja bodal. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal yang dilakukan dapat lebih kecil, karena daerah tersebut masih bergantung dengan pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Anisya Ayu L, Sri Rahayu, Junaidi. 2019. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Andi Patiroi. 2019. Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. *Jurnal Economic Resource*. Vol. 2, No. 2 ISSN 2620-6296.
- Arsyad, Lincoln. 2015. Pembangunan Ekonomi. UPP STIM. YKPN. Yogyakarta. Bappenas, 2004.
- Asepma Hygi Prihastuti, Taufeni Taufik, Restu Agusti. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. Vol.10, No. 2, Oktober, 143-154. Dosen Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Ayu Purnawati. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Lampung.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2014 tentang Tata Cara Penyimpanan Informasi Keuangan Daerah (IKD) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) melalui Aplikasi Penyimpanan Data Informasi Gaji dan Tabungan Asuransi PNSD (Aplikasi PENDITA PNSD).
- E. Agus, M. Daerah, M Safri. 2016. Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Marangin.
- Fakhry, Syahadat Muhammad. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Lampung.
- Fatimah, Siti. 2019. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2017.
- Gerungan, Silvia Febriany dkk. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara.
- Gozali, , Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2008. Analisis Investasi Sektor Publik Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN.
- Halim, Abdul dkk. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah). Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur).
- Indiyanti, Ni Made Deni. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. Jurnal Manajemen UNUD.
- Kurnia Adi Suwardi, Afrizal Tahar. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta) Jurnal InFestasi Vol. 11, No.2, Desember 2015, 118 – 136. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- M. Tahar, Afrizal, dan Zakhiya. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandiria Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol. 12, 88-99. Fakultas Ekonomi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . UPP STIM. YKPN. Yogyakarta
- Marlianita, Yulistiani, & Suji Abdullah Saleh. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 25–35.
- Mega Sistiana, M. Hadi Makmur. 2014. Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 12, 277-286.
- Ni Made Deni Indiyani, Henny Rahyuda. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Perovinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Udayana, Vol. 7, No. 9, 4713-4746 ISSN 2302-8912.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2014.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 sampai 2014.
- Republik Indonesia. 2004. UndangUndang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. UndangUndang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. UndangUndang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. UndangUndang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- www.bps.go.id
- www.djpk.kemenkeu.go.id
- Zulyanto, Aan. 2010. “ Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap PertumbuhanEkonomi di Provinsi Bengkulu. Tesis Dipublikasikan. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas.